

Judul : Netralitas TNI harga mati
Tanggal : Selasa, 14 Nopember 2023
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

Netralitas TNI Harga Mati

Komis I DPR menyetujui pengangkatan KSAD Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI. Agus memaparkan sejumlah langkah untuk menjaga netralitas TNI di Pemilu 2024. Komis I DPR pun membentuk panitia kerja untuk mengawal netralitas TNI.

JAKARTA, KOMPAS — Sesuai menjalani uji kelayakan dan keputusan selama sekitar dua jam, Komis I DPR menyetujui pengangkatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI. Agus berkomitmen untuk menjaga netralitas TNI dalam setiap tahapan Pemilu 2024 setelah kelak dilantik sebagai Panglima TNI oleh Presiden, selain janjinya menjadikan prajurit TNI "Prima" atau singkatannya dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif.

Kehadiran Jenderal Agus Subiyanto untuk menjalani uji kelayakan dan keputusan di Komis I DPR, Jakarta, Senin (13/11/2023), ditemani Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Kepolisian Negara RI Jenderal (Pol) Listyo Sigit Prabowo. Hadir pula Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal Fadjar Prasetyo.

Agus, yang baru menjabat Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) pada 25 Oktober 2023, menjadi calon tunggal Panglima TNI yang diajukan Presiden Joko Widodo kepada DPR untuk memperoleh persetujuan Pengantian Panglima TNI ini karena Yudo Margono akan memasuki masa purnatugas pada 26 November 2023. Setelah Komis I DPR menyetujui pengangkatan Agus, hasil keputusan komis akan dibawa ke Rapat Paripurna DPR pada Selasa (21/11) untuk memperoleh persetujuan dari DPR.

Salah satu yang dijanjikan Agus sebagai Panglima TNI adalah menjaga netralitas TNI dalam setiap tahapan Pemilu 2024. Selain itu, sinergitas dan soliditas TNI-Polri dalam mengamankan jalannya pemilu pun bakal diperkuat. Dengan demikian, kelangsungan roda pemerintahan dan stabilitas politik akan tetap terjaga. "Saya sudah sampaikan kepada Komis I bahwa kita TNI koridornya

sudah jelas bahwa netralitas TNI harga mati," tegas Agus.

Sikap netral itu pun telah diamankan dalam sejumlah aturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI dan UU No 7/2017 tentang Pemilu. Jika ada yang melanggar, prajurit bisa dijatuhi hukuman pidana ataupun hukuman disiplin dari atasannya.

"Kami juga sudah menjelaskan kepada Komis I bagaimana langkah-langkah (menjaga) netralitas TNI ini. Salah satunya memberikan buku saku yang harus dimiliki seluruh prajurit. Kemudian juga memberikan penyuluhan, penekanan kepada seluruh prajurit sampai ke tingkat pangkat terendah, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak dilakukan," tutur Agus.

Berkaitan dengan netralitas TNI ini, Komis I DPR juga telah menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Netralitas TNI dan Panja Netralitas Pemilu 2024. Khusus Panja Netralitas Pemilu 2024 akan mengawasi penerapan netralitas pada mitra kerja Komis I selain TNI, yakni Badan Intelijen Negara, Badan Siber dan Sandi Negara, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Panja akan dipimpin Wakil Ketua Komis I DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Utut Adianto.

"Insya Allah ini menepis kekhawatiran semua. Tadi beliau (Jenderal Agus Subiyanto) juga sudah menyatakan tegas tidak ada hal netralitas dan Komis I juga akan mengawal melalui panja," ujar Ketua Komis I DPR Meutya Hafid yang berasal dari Fraksi Partai Golkar.

Anggota Komis I DPR dari Fraksi PDI-P, Tubagus Hasanuddin, mengatakan, selain ancaman sanksi bagi prajurit yang tidak netral dan buku saku netralitas bagi prajurit, Agus menjanjikan akan membuat nomor

hotline pengaduan dari masyarakat dan memonitor langsung pelaksanaan prinsip netralitas. Ia melihat langkah yang diluar Agus sudah baik. "Saya catat semua karena ini menjadi bahan nanti kami mengontrolnya," ucapnya.

Secara terpisah, menurut peneliti politik dan keamanan dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Muhammad Haripin, kekhawatiran bahwa TNI tak akan netral kerap muncul di setiap pemilu. Namun, di pemilu kali ini, kekhawatiran itu lebih besar karena putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, menjadi salah satu kandidat di Pemilihan Presiden 2024. Potensi pelanggaran ini menjadi pekerjaan rumah Agus setelah menjabat Panglima TNI untuk mencegahnya. Juga penting peran serta dari DPR dan masyarakat untuk ikut mengawasi.

Visi Prima

Selain soal netralitas TNI, Agus Subiyanto memiliki visi untuk menjadikan TNI Prima atau singkatannya dari profesional, responsif, integratif, modern, dan adaptif. Selama lebih kurang 20 menit, Agus memaparkan visi ini berikut lima misi untuk mencapai visi tersebut di hadapan Komis I DPR.

Kelima misi dimaksud, memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara; meningkatkan kemampuan yang responsif menghadapi perkembangan lingkungan strategis; dan memantapkan kemampuan TNI yang integratif serta bersinergi dengan kementerian/lembaga dan komponen bangsa lainnya. Dua misi berikutnya, percepatan modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan mewujudkan TNI yang adaptif terhadap tuntutan tugas dan spektrum ancaman.

Untuk mencapai visi dan misi itu, Agus menyampaikan sejumlah



Calon Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto bersiap memaparkan visi dan misi dalam rapat dengar pendapat dengan Komis I DPR di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/11/2023).

program prioritas. Untuk memelihara dan memantapkan profesionalisme TNI, misalnya, TNI harus betul-betul terlatih, terorganisasi, dilengkapi persenjataan yang memadai, dan kesejahteraan yang memadai.

Agar terorganisasi dengan baik, pembinaan personel di jajaran TNI harus berdasarkan sistem prestasi (*merit system*). Lalu, agar tersenjatai dengan baik, perlu pemenuhan alutsista yang modern.

Selanjutnya, untuk kesejahteraan personel TNI, diperlukan perhatian khusus bagi para

prajurit yang berada di daerah operasi berupa sejumlah tunjangan, seperti fasilitas perumahan, pendidikan, dan kesehatan yang layak. Sebab, hal ini akan berpengaruh pada moral dan semangat prajurit saat melaksanakan tugas.

"Sebagai tambahan, terkait kesejahteraan, saya juga ingin menyampaikan bahwa atas semua jasa dan pengorbanan para pejuang dan senior TNI saya akan memberikan perhatian kepada para purnawirawan dan warakawari," ucap Agus.

Untuk program prioritas me-

ningkatkan kemampuan TNI yang responsif, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian bersama, antara lain dalam mengatasi konflik vertikal seperti masalah di Papua. Menurut Agus, di Papua dibutuhkan pendekatan *smart power* yang merupakan kombinasi *hard power*, *soft power*, dan diplomasi militer.

Pendekatan *hard power* melalui siasa tempur untuk menghadapi kombatan dalam rangka penegakan hukum. *Soft power* dilakukan dengan mendukung percepatan pembangunan dan

keesejahteraan di Papua. Pendekatan ini dilakukan bersama-sama dengan semua kementerian/lembaga serta para pemangku kepentingan. Kemudian, diplomasi militer dilakukan dengan menginisiasi kegiatan latihan bersama, misal pertukaran personel TNI dengan negara-negara di kawasan. Diplomasi militer ini bertujuan untuk membangun hubungan interpersonal antar-prajurit serta menciptakan persamaan pandangan dalam menyelesaikan masalah di Papua. (BWW)